

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Studi

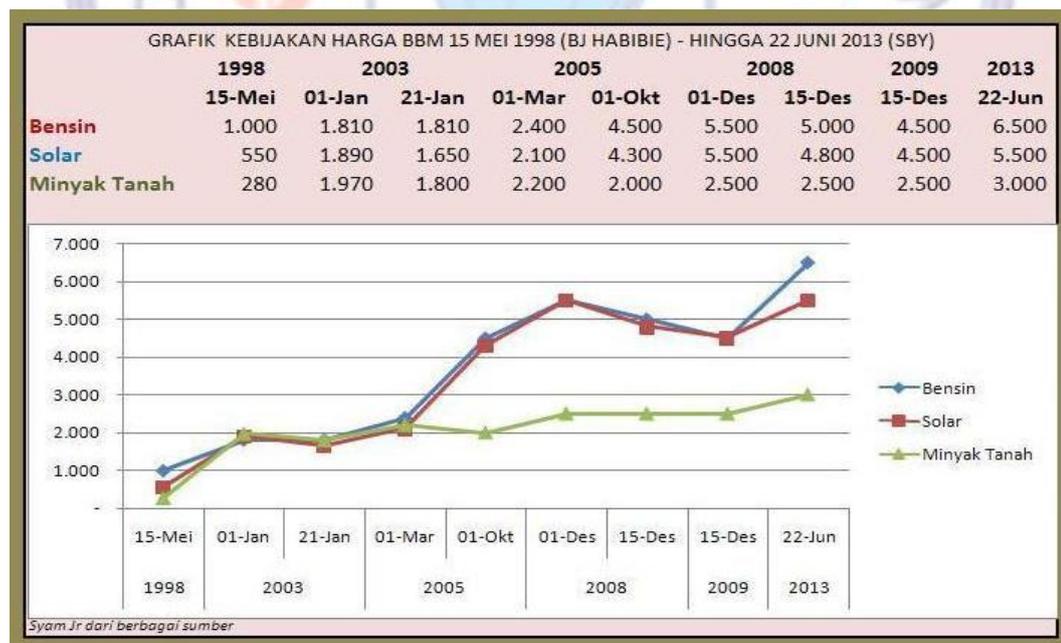
Globalisasi sering kali dinyatakan sebagai suatu hal yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi diberbagai negara di dunia. Perubahan ekonomi global yang terjadi secara cepat, berpengaruh pada menurunnya nilai tukar mata uang dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi.

Krisis ekonomi dapat melanda suatu negara apabila perubahan perekonomian sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Sejarah mencatat krisis ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 1997 telah memporak-porandakan perekonomian global. Tidak memandang perekonomian negara berkembang ataupun negara maju, beberapa negara khususnya negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Thailand, Hongkong, Malaysia, dan Filipina terkena dampaknya termasuk Indonesia yang merupakan negara paling parah terkena dampak krisis ekonomi tersebut.

Krisis ekonomi atau sering disebut dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 berdampak buruk pada negara dan rakyatnya. Krisis moneter telah melumpuhkan kondisi perbankan dan dunia usaha. Selain itu, krisis moneter memaksa masyarakat, khususnya masyarakat kecil untuk menerima dan menghadapi kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus.

Krisis moneter yang dimulai pada era orde baru, semakin memperlihatkan kondisi Indonesia yang terus memburuk, terutama dalam bidang ekonomi. Tingginya krisis moneter diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Setelah mengalami goncangan krisis moneter pada tahun 1998, perekonomian Indonesia mulai bangkit dan bergerak kembali. Namun pada tahun 2004, kondisi perekonomian Indonesia perlahan mulai merasakan tekanan akibat dari kenaikan harga minyak dunia dengan diumumkannya kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Selama tahun 2005 harga minyak dunia mengalami lonjakan yang cukup tinggi yaitu menjadi 51,4 dolar/barel sehingga menyebabkan harga BBM di Indonesia meningkat sekitar 100% pada bulan Oktober 2005.



Gambar 1.1
Grafik Kebijakan Harga BBM
Sumber www.google.com

Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005, pemerintah dan masyarakat bisa bernafas lega, karena selama kurang lebih tiga tahun harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terbilang stabil. Akan tetapi menjelang akhir tahun 2008, tepatnya tanggal 1 Desember 2008, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan dengan kenaikan harga BBM. Namun kenaikan harga tersebut dapat dikendalikan. Hal tersebut terbukti dua pekan setelah itu harga BBM mengalami penurunan, hingga pada akhir tahun 2009 harga BBM di Indonesia masih mengalami penurunan yang berdampak baik pada tingkat harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang terbilang stabil.

Harga harga minyak dunia yang tidak stabil selalu berdampak pada kondisi BBM di tanah air. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah membuat keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Naiknya harga BBM di Indonesia diawali dengan kenaikan harga minyak dunia yang membuat pemerintah tidak dapat menjual BBM kepada masyarakat dengan harga yang sama dengan harga sebelumnya. Kenaikan harga minyak dunia disebabkan oleh bergejolaknya salah satu negara penghasil minyak dunia, Irak. Jika kondisi geopolitik di Irak terus terjadi, hal ini akan berdampak pada tekanan fiskal dan meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia. (Republika.co.id)

Harga minyak dunia yang fluktuatif tidak hanya berpengaruh pada harga BBM tanah air, akan tetapi ikut berpengaruh pada anggaran negara. Sementara itu, situasi ekonomi dunia yang tidak menentu dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam negeri perlu direspon dengan penurunan biaya subsidi BBM, oleh karena itu untuk mendorong realisasi pembangunan infrastruktur dan

sejumlah sektor vital di Indonesia, pemerintah melakukan langkah penyesuaian melalui pengurangan dan relokasi subsidi bahan bakar minyak serta menaikkan harga BBM bersubsidi hingga mendekati harga pasar.

Mengingat kondisi minyak dunia, baik harganya yang meningkat dan persediaannya yang semakin menipis, pada tanggal 22 Juni 2013 melalui Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 07.PM/12/MPM/2013 pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan BBM tersebut diperkirakan akan memberikan dampak yang cukup signifikan pada laju inflasi tahun 2013. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam pengendaliannya agar laju inflasi tetap berada pada rentang target yang telah ditetapkan.

Pasca kenaikan harga BBM, Bank Indonesia telah memprediksikan laju inflasi berada pada level 7,8% dengan perkiraan kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi penyumbang inflasi sebesar 2,46%. Jika di lihat dari sisi perbankan, Bank Indonesia perlu menaikkan tingkat bunga acuan (*BI Rate*) sebesar 50 sampai 75 basis poin, mengingat ekspektasi inflasi terlihat cukup besar.

Indonesia sebagai negara berkembang sering kali dihadapkan dengan tingginya tingkat inflasi. Seperti yang terjadi di negara-negara berkembang pada umumnya, fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi suatu “penyakit” ekonomi makro yang meresahkan pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Kenaikan harga BBM di Indonesia secara langsung memicu laju inflasi yang tinggi karena memberikan dampak pada kenaikan harga-harga umum terutama

pada kelompok bahan pangan dan tarif transportasi, yang merupakan dua penyumbang utama angka inflasi nasional.

Laju inflasi yang tidak stabil akan mengganggu stabilitas perekonomian, termasuk memberikan dampak pada anggaran negara, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laju inflasi yang tidak dapat dikendalikan, akan berdampak pada membengkaknya pengeluaran pemerintah sehingga pemerintah mengalami defisit anggaran.

Menanggapi stabilitas dunia perekonomian dan laju inflasi di Indonesia, maka untuk menjaga stabilitas laju inflasi diperlukan peranan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai otoritas fiskal dan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas moneter dan menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sistem pemerintahan yang menganut pola pertanggungjawaban terpusat beralih menjadi pola desentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan bertanggung jawab penuh atas potensi daerah yang dimilikinya. Diberlakukannya sistem otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi dalam rangka memperkuat perekonomian nasional melalui penguatan perekonomian daerah untuk menghadapi era perdagangan bebas. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan keberhasilan tersebut dapat dilakukan dengan perwujudan reformasi sektor publik.

Reformasi sektor publik, berarti reformasi terhadap keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah dalam pelaksanaannya akan berdampak pada reformasi anggaran (*budgeting reform*) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas APBD. Dengan berlakunya sistem reformasi, maka saat ini pertanggungjawaban APBD hanya memerlukan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pada prinsipnya APBD memuat pendapatan dan belanja daerah, dimana pendapatan daerah sebagian besar berasal dari APBN dan sisanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, belanja daerah yang dilakukan pemerintah pada dasarnya menggunakan prinsip standar satuan harga tahun lalu. Namun dengan adanya kenaikan harga BBM tentu saja berdampak pada inflasi dan secara otomatis akan mengubah standar harga satuan, karena standar satuan harga dipengaruhi oleh harga pasar.

Inflasi yang cukup tinggi dan terus-menerus akan mengacaukan APBD, karena biaya anggaran rutin maupun anggaran pembangunan kemungkinan akan membengkak sehingga tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Bahkan laju inflasi yang berfluktuasi atau tidak menentu dapat mengakibatkan defisit anggaran pemerintah.

Merujuk hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi untuk penyusunan laporan Tugas Akhir dengan judul **“Dampak Inflasi Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan beberapa fenomena masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perkembangan inflasi di kota Tasikmalaya?
- b. Bagaimana perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya?
- c. Bagaimana dampak inflasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya?

1.3 Maksud dan Tujuan Studi

Studi ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan Diploma III Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, studi ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Mengetahui perkembangan inflasi di Kota Tasikmalaya.
- b. Mengetahui perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- c. Mengetahui dampak inflasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Studi

Studi yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai inflasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dampaknya pada kegiatan perekonomian dan khususnya pada APBD kota Tasikmalaya.

b. Bagi Pemerintah kota Tasikmalaya

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi dan masukan yang baik bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai otoritas fiskal dalam rangka upaya pengendalian inflasi sehingga tidak memberikan dampak negatif pada kegiatan ekonomi di kota Tasikmalaya khususnya pada struktur APBD kota Tasikmalaya.

c. Bagi Pihak Lain

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5 Metode Studi

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu meneliti, mengolah dan menyajikan data untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata mengenai objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu melalui :

a. Praktek Kerja Lapangan

Laporan tugas akhir disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis saat praktek kerja lapangan pada Bidang Ekonomi Moneter, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya. Kemudian penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dengan tujuan memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam laporan tugas akhir.

b. Wawancara

Yaitu suatu bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti.

c. Penelitian Kepustakaan

Yaitu suatu usaha pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan penelitian terhadap literatur buku referensi dan sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data sekunder yang dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Waktu dan Tempat

Penulis melakukan studi dan penelitian untuk penyusunan laporan Tugas Akhir di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya yang terletak di jalan Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya.